

BAB I

PENDAHULUAN

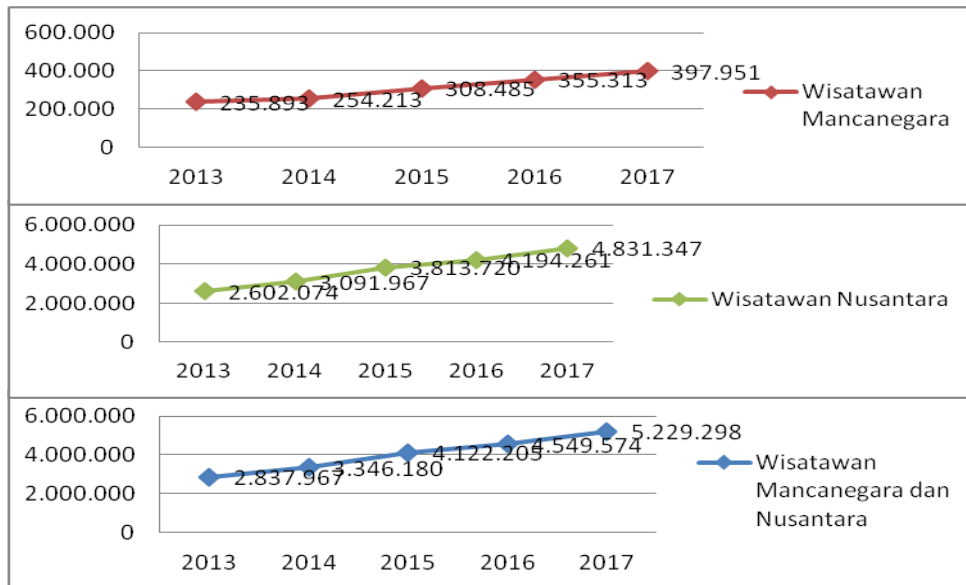
A. Latar Belakang

Adanya otonomi daerah telah membawa dampak dalam kemajuan dan perkembangan yang terjadi di daerah. Hal ini disebabkan oleh dorongan keinginan daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri sesuai pada potensi yang terdapat. Dengan otonomi daerah tentu membawa peluang bagi daerah untuk memiliki ases kewenangan penuh dalam mengembangkan potensi pariwisata. Pada pelaksanaan otonomi daerah mencakup tiga hal penting, seperti: 1). Good governance, 2). Kemandirian, dan 3) Komplementasi (Zaenuri, 2007, p. 172). Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khusus terutama pada pengembangan pariwisata lokal, dengan berpihak pada rakyat supaya dapat menikmati hasil dari wisata.

Kesadaran terhadap sektor pariwisata menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah di setiap daerah. Salah satu daerah yang paling diminati wisatawan untuk berdestinasi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menawarkan berbagai macam objek wisata. Pariwisata yang berasal dari budaya dan hal yang berkaitan dengan sejarah salah satu keunggulan Yogyakarta yang memberikan kesan berbeda pada wisatawan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pariwisata sudah menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat lokal sebagai sumber pererkonomian daerah maupun mata pencarian mereka. Di lihat dari data statistik kepariwisataan di Yogyakarta pada tahun 2013 sampai dengan 2017, objek wisata dan museum DIY terdata tahun 2017 dengan jumlah 131 objek wisata dengan

berbagai potensi seperti objek wisata alam, objek wisata budaya, objek wisata buatan, dan objek wisata desa atau kampung terus mengalami peningkatan wisatawan Yogyakarta, seperti berikut ini:

Gambar 1. Pertumbuhan Pengunjung Wisatawan DIY



Sumber: Statistik Kepariwisata DIY (2017, p. 2)

Setiap tahun, pada tahun 2013-2014 jumlah wisatawan meningkat sebesar 508,213, Tahun 2014-2015 jumlah wisatawan meningkat sebesar 776,025, Tahun 2015-2016 jumlah wisatawan meningkat sebesar 427,369, dan Tahun 2016-2017 jumlah wisatawan meningkat sebesar 679,724, jika di total jumlah peningkatan wisatawan di jogja dari tahun 2013-2017 sebanyak 2.391,331. Statistik kunjungan wisatawan di jogja terus mengalami peningkatan, itu membuktikan pariwisata di Yogyakarta sangat di minati wisatawan asing maupun lokal.

Salah satu obyek wisata yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini adalah wisata Kampung menjadi salah satu wisata primadona kunjungan wisatawan. Saat ini Kampung atau desa wisata menjadi daya tarik bagi

wisatawan asing maupun wisatawan lokal dengan menawarkan produk berupa alam dan budaya (Danar, 2019; Hidayah & Fatoni, 2019). Menurut Rencana Strategis Dinas Pariwisata DIY Tahun 2008 jumlah kampung atau desa wisata hanya berjumlah 30, seiring adanya pertumbuhan kampung atau desa ingin ikut berpartisipasi dalam wisata menjadikan kampung atau desa wisata pada tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah sangat pesat menjadi 112 kampung atau desa wisata yang di golongkan dalam 3 kriteria, yaitu: “1). *Maju/mandiri: 30 kampung atau desa.* 2). *Berkembang: 40 kampung atau desa.* 3). *Perintisan: 42 kampung atau desa*”.

Dari perkembangan itu dapat di pahami bahwa secara jumlah banyaknya kampung atau desa yang ikut berpartisipasi membuat kualitas prosentasenya rendah karena adanya permasalahan dalam pengembangannya. Fokus pemerintah saat ini menciptakan kampung atau desa wisata yang mempunyai daya saing dalam mendongkrak pendapatan daerah mau pun masyarakat melalui potensi yang di unggulkan dan menyediakan pelayanan dalam bentuk fasilitas sesuai dengan semestinya, maka dari itu pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban dalam upaya pengembangan. Saat ini kota Yogyakarta sudah memiliki 17 kampung wisata yang sudah di resmikan secara langsung oleh pemerintah kota dengan berbagai potensinya, seperti:

Tabel 1. Kampung Wisata Kota Yogyakarta

No	Nama Kampung Wisata	Potensi kampung Wisata
1	Kampung Dipowinatan	Potensi Sosial budaya dan kesenian
2	Kampung Kadipaten	Potensi Heritage dan asesoris khas Yogya
3	Kampung Taman	Potensi budaya dan batik lukis
4	Kampung Sosromeduran	Potensi Akomodasi dan budaya
5	Kampung Tahunan	Potensi Batik jumput
6	Kampung Warungboto	Potensi Sosial budaya dan lingkungan
7	Kampung Pandeyan	Potensi Budaya
8	Kampung Purdayan	Potensi Budaya dan kuliner malam
9	Kampung Rejowinangun	Potensi Budaya
10	Kampung Prenggan	Potensi Budaya dan kuliner malam
11	Kampung Dewobronto	Potensi Penataan lingkungan dan ecotourism
12	Kampung Sekarniti	Potensi Budaya
13	Kampung Cokrodiningratan	Potensi Heritage dan penataan lingkungan
14	Kampung Becak Maju	Potensi Penataan lingkungan
15	Kampung Kauman	Potensi Sejarah dan heritage
16	Kampung Pakualaman	Potensi Budaya
17	Kampung Syaidan	Potensi Penataan lingkungan

Sumber: Diolah (pariwisata.jogjakarta.go.id)

Dari acara yang diselenggarakan Forum Komunikasi Desa/Kampung Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta sudah membagi kampung wisata yang masuk kriteria mandiri hanya satu yaitu kampung Dipowinatan, pada kampung yang di krateriakan berkembang terdapat 11 kampung, dan terakhir 5 kampung masih dalam karekteria rintisan (Purwando, 2018). Akreditasi ini nantinya di berikan melalui klarifikasi berdasarkan PERWALI Yogyakarta No. 115 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kampung wisata. Tujuan dari akreditasi agar

mempermudah pemerintah dalam membantu pengembangan Kampung wisata yang terkait melalui kategorinya masing-masing. Pada 2018 akreditasi sudah berjalan pada 8 kampung, yaitu: kampung Gedongkiwo, kampung Sosromenduran, kampung Kadipaten, kampung Warung Boto, kampung Rejowinangun, kampung Cokrodiningrat, kampung Tamansari, dan Kampung Dipowinatan (Arifa, 2018). Sisa dari 17 kampung itu akan di akreditasi pada tahun berikutnya sambil menunggu kampung lain yang mau ikut dalam penyelenggaraan akreditasi.

Salah satu kampung yang sudah melewati akreditasi adalah Tamansari, saat ini Tamansari sudah dikelola dan dikembangkan menjadi kampung wisata. Wisata di sana menonjolkan aktivitas keunikan budaya dan aktivitas kehidupan masyarakat kampung itu sendiri. Kampung Wisata itu berdekatan dengan Water Castel tepatnya di barat atau di selatan pasar ngasem, juga sebagai bagian dari daya tarik penunjang wisata Water Castel. Pengelolaan kampung Tamansari di manfaatkan warga sekitar untuk memenuhi perekonomian hidupnya, salah satunya kerajinan batik telah turut andil menjadi Objek destinasi kampung wisata Tamansari. Kampung wisata Tamansari sudah melewati akreditasi sebagai kampung wisata di kota jogja dalam karakteria Rintisan. Ini menyatakan bahwa kampung Tamansari suatu bentuk baru penerapan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism 'CBT'), yang dimana dalam pembangunan pariwisata ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi khususnya pada pengembangan destinasi (Sidiq & Resnawaty, 2017). Agar nantinya kampung wisata Tamansari mempunyai daya saing yang kuat.

Alasan peneliti mengambil Kampung wisata Tamansari di karenakan wisata Water Castel menjadi sebuah destinasi yang terus mengalami peningkatan jika di lihat dari kunjungan wisatawan, berikut ini jumlah pengunjung di Tamansari pada tahun 2015-2017:

Tabel 2. Kunjungan Wisatawan Taman Sari

No	Wisatawan	2015	2016	2017
1	Wisatawan Mancanegara	65.137	87.485	99.407
2	Wisatawan Nusantara	334.833	426.847	434.138
	Jumlah	399.970	514.332	533.545

Sumber: Statistik Kepariwisata DIY (2017, p. 65)

Kunjungan wisatawan asing maupun lokal di Tamansari terus mengalami kenaikan. Tahun 2015 wisatawan mancanegara berjumlah 65.137 dan wisatawan nusantara dengan jumlah 334.833. Pada Tahun 2016 wisatawan mancanegara berjumlah 87,485 dan wisatawan nusantara dengan jumlah 426.847. Serta di tahun 2017 wisatawan mancanegara berjumlah 99.407 dan wisatawan nusantara berjumlah 434.138. Dari peningkatan wisatawan yang ada, dengan terciptanya kampung wisata yang berada di kawasan Objek Water Castel mempunyai potensi untuk lebih dikembangkan.

Melalui analisis sumber informasi yang ada, permasalahan mendasar penelitian ini di lakukan karena Kampung wisata Tamansari belum berkembang dengan baik karena tidak termasuk dalam kriteria sebagai kampung wisata mandiri atau pun berkembang dari segi kelembagaan, produk, pelayanan (sarana & prasarana), dan pengelolaan yang ada di nilai masih kurang dan perlu penguatan serta peningkatan kualitasnya (Rusqiyati, 2019). Juga menghadapi

permasalahan seperti masalah kerjasama antara stakeholder yang masih kurang optimal.

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di kampung wisata khususnya Tamansari harus ada peran yang optimal antara masing-masing para Stakeholder yang terlibat. Maka di butuhkan pengembangan secara strategis dan sinergi dengan tatakelola kolaborasi. Dalam model Tata kelola kolaborasi di anggap bisa menjadi alternatif pilihan untuk melakukan peningkatan pengembangan pada objek wisata, serta lebih mudah dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana dan subjek pengembangan objek wisata Tamansari. Dengan adanya akreditasi kampung Tamansari meskipun masuk krakteria rintisan dalam kategori kampung budaya, dan sejarah di harapkan mampu menciptakan tatakelola kalaborasi wisata yang baik dengan memberikan peluang kepada pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi sebagai stakholder untuk mengatasi permasalahan pengembangan kampung wisata khususnya Tamansari. Agar nanti kedepannya kampung wisata Tamansari dapat menjadi kampung dengan krakteria berkembang dan maju.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah, swasta, Akademisi, dan masyarakat dalam pengembangan wisata kampung Taman Sari?
2. Bagaimana pola hubungan kerjasama?
3. Bagaimana Tatakelola kolaborasi di antara stakeholder?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian itu di buat sebagai capai dari peneliti, berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ada, Berikut tujuan dibuatnya penelitian ini:

1. Berupaya untuk mengetahui peran pemerintah, swasta, Akademisi dan masyarakat dalam pengembangan wisata kampung Taman Sari.
2. Berupaya untuk mengetahui pola hubungan kerjasama.
3. Berupaya untuk mengetahui Tatakelola kolaborasi di antara stakeholder

D. Manfaat Penelitian

Dalam keberhasilan penelitian harapan dari karya penulisan ini mampu mempunyai manfaat sebagai ilmu bagi pembaca dan penulis, berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a Memberikan sumbangan kepada publik ilmu yang bermanfaat sebagai acuan dalam Tatakelola Kalaborasi Kampung wisata berbasis Masyarakat.
- b Memberikan sumbangan manfaat dalam menambah tulisan ilmiah atau referensi dalam rangka pengembangan konsep, dan teori.
- c Memberikan sumbangan kepada ilmu sosial dan politik bahwa komunikasi yang sinergi akan mempengaruhi hasil pengembangan destinasi.

2. Manfaat Praktis

- a Memberikan pengetahuan tentang proses pengembangan destinasi Kampung Taman Sari.
- b Memberikan pengetahuan ke pada masing-masing pemangku kepentingan akan masalah yang terjadi.
- c Memberikan pengetahuan kepada pemerintah hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam Tatakelola Kolaborasi pengembangan destinasi.

E. Literature Review

Kajian pustaka (literature review) hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai permasalahan yang sama. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesamaan penelitian, plagiarisme, dan duplikasi penelitian. Kajian pustaka menunjukkan posisi penelitian saat ini terhadap penelitian terdahulu. Melalui kajian pustaka, memperkaya bahan referensi dalam penyusunan penulisan. Kajian pustaka bisa berupa buku, jurnal dan literatur ilmiah lain yang relevan dengan penelitian. Oleh karena itu untuk memenuhi standarisasi penelitian, proposal ini di buat dengan melihat, meninjau, dan mengidentifikasi kembali studi penelitian terdahulu.

Adapun aspek utama untuk melakukan literature penelitian ini, sebagai berikut; “ 1). *Survai artikel atau karya ilmiah penelitian yang berkaitan*, 2). *Melakukan evaluasi, identifikasi masalah perbedaan masalah dengan penelitian ini, dan 3). Mendapatkan masukan terhadap permasalahan publikasi terbaru atau terlama, sehingga mendapat gambaran yang jelas akan apa yang di teliti “*. Selain berfungsi sebagai eksplorasi mendalam atas temuan yang terkait dengan penelitian nantinya, akan berfungsi juga sebagai acuan atau pedoman dalam penelitian ini nantinya. Penelitian terdahulu di lakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk mempermudah melakukan literatur review pertama peneliti membuat tabel dengan 15 penelitian terdahulu, Kedua melakukan identifikasi penelitan terdahulu. Seperti berikut ini:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Vol / no / Tahun	Isi
1	Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Noor Rochman	Vol. 1, No. 1, 2016	Penelitian ini bertujuan mengembangkan model desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan yaitu studi literatur dari berbagai sumber ilmiah.
2	Perkembangan Tata Kelola Obyek Dan Daya Tarik Wisata Budaya Keraton Surakarta	Monica Pramudyasari	Vol. 31, No. 1, 2016	Mengetahui unggulan dan daya tarik wisata Keraton Surakarta menurut pengelola dan wisatawan dan untuk mengetahui perkembangan tata kelola Keraton Surakarta sebagai obyek dan daya tarik wisata budaya.
3	Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang Dan Sekitarnya Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	Endah Trihayuningtyas, Wisnu Rahtomo, Haryadi Darmawan	Vol. 15, No. 1, 2018	Banyaknya sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pariwisata, sumberdaya manusia yang jumlahnya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja bidang pariwisata dan sumberdaya potensial lain yang belum dimanfaatkan secara optimal, maka dibutuhkan format tata kelola yang sesuai dengan kondisi tersebut agar semua sumberdaya potensial dapat dimanfaatkan secara optimal.
4	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat	Ade Jafar Sidiq & Risna Resnawaty	Vol. 4, No. 1, 2017	Mengkaji keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal.
5	Model	Isnaini	Jurnal	memperoleh gambaran yang jelas

	Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kota Yogyakarta	Muallisin	Bappeda, No, 2 Tahun 2007	mengenai peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta, dan mencari model yang efektif bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta.
6	Tata Kelola Pariwisata-Bencana Volcano Tour Merapi Dalam Perspektif Collaborative Goernance	Muchamad Zaenuri	Paper Penelitian, Tahun 2016	Pariwisata bencana dari perspektif Tatakelola Kolaborasi dengan maksud memberi jawaban atas kekurangan pendekatan yang selama ini sudah banyak. Studi ini mendeskripsikan serta menganalisis transformasi kolaborasi Tatakelola bencana dengan kasus di Volcano Tour.
7	Analisis Pengembangan Sarana Prasarana Obyek Wisata Alam Telaga Ngebel Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Titis Ariani Mustikawati, Sunarti, Dan Edriana Pangestuti	Vol. 53 No. 2, 2017	Mengenai peran Disbudparpora dalam pengembangan obyek wisata Telaga Ngebel mendapatkan hasil dalam perencanaan yang meliputi daya tarik wisata, pembangunan sarana dan prasarana serta aksesibilitas, dan juga perencanaan promosi. Mengimplementasikan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada aspek ekonomi.
8	Desa Wisata Sebagai Community Based Tourism	Dhimas Setyo Nugroho	Vol. 1, No. 2, 2017	Konsep community-based tourism di desa wisata rumah dome telah berhasil menjadi alat pemicu perkembangan warga komplek rumah dome dan lingkungannya. Perkembangan warga yang pesat dan tingginya partisipasi warga dapat memunculkan strategi untuk mempertahankan desa wisata dari

				persaingan industri pariwisata.
9	Daya Tarik Kawasan Sosrowijayan Sebagai Kampung Wisata Bagi Wisatawan Mancanegara	Riska Ardelia Permatasari, dan Hadi Wahyono Sih, SH., Mhum	Vol. 5, No. 1, 2017	Mengetahui tingkatan daya tarik dan faktor yang mempengaruhi daya tarik kawasan Sosrowijayan Yogyakarta terutama pada wisatawan mancanegara.
10	Potensi Kampung Sitisewu Sosromenduran Sebagai Kampung Wisata Di Kota Yogyakarta	S. Sumartiah	Jurnal Bappeda, 2016	menggali potensi kampung Sitisewu, Kelurahan Sosromenduran, sebagai kampung wisata. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang bisa digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah kota, yang saat ini sedang menggalakkan adanya kampung wisata.
11	Dampak Keberadaan Kampung Wisata Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat	Josephine Wuri, Y. Rini Hardanti, dan L. Bambang Harnoto	Vol. 18, No. 2, 2015	Sektor pariwisata memberikan efek berantai (multiplier effect) akan mendorong perekonomian masyarakat sekitar, sehingga memberikan distribusi pendapatan penduduk di kawasan sekitar pariwisata.
12	Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang	Fitri Handayani, dan Hardi Warsono	Vol. 6, No. 3, 2017	Menganalisis peran stakeholder dengan memetakan pengaruh dan kepentingannya, untuk mencari faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata pantai karang.
13	Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Bandengan	Tika Mutiarawati, dan Sudarmo	Vol. 1, No. 2, 2017	Mengetahui tata cara pemerintah secara kolaborasi antara pemangku dengan tujuan penyelesaian banjir pasang surut di Bandengan pada studi

	Pekalongan			penelitian menggunakan teori De seve sebagai acuan kalaborasi.
14	Collaboration Governance dalam pembangunan kawasan pedesaan	Ranggi Ade Febrian	Vol. 2, No. 1, 2016	Penelitian ini meninjau konsep dan regulasi terkait UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan menggunakan teori Stephen Balogh.
15	Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis Revitalisasi Wisata Cagar Budaya Banten Lama.	Ahmad Sururi	Vol. 25, No. 1 (Mutiarawati, 2017), 2018	Peneliti mencoba untuk melakukan Identifikasi isu-isu strategis dan prioritas serta melakukan pengembangan model inovatif kebijakan Collaborative Governance.

Sumber: Diolah Peneliti (2019)

Penjelasan dalam indentifikasi penelitian terdahulu di lakukan melalui pengelompokan agar mempermudah memberikan perbedaan seperti penelitian yang di lakukan Rochman (2017) mencoba mengkaji pengembangan desa wisata dengan cara menemukan dan mengenal kemampuan masyarakat. Berikutnya Sidiq and Resnawaty (2017) mencoba mengkaji perkembangan dan melakukan perumusan model perkembangan berbasis masyarakat di desa Linggarjati Kuningan. Penelitian Muallidin (2007) melihat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan menentukan model CBT di Yogyakarta. Penelitian Nugroho (2017) melihat sejauh mana keberhasilan konsep CBT wisata rumah dome. Penelitian Pramudyasari and Soemanto (2016) melihat keunggulan dan daya tarik melalui studi penomenologi pengelola dan wisatawan di wisata keraton surakarta.

Penelitian Trihayuningtyas, Rahtomo, and Darmawan (2018) mencoba mencari format tatakelola yang sesuai dengan agar sumberdaya dapat di manfaatkan secara optimal di pariwisata kawasan pulau Camba-cambang dan sekitarnya. Penelitian Zaenuri (2016) menunjukkan deskripsi dan analisa tata kelola Kolaborasi pariwisata-bencana dalam kontek manajemen bencana pertahanan. Penelitian Handayani and Warsono (2017) mencoba Menganalisis peran stakholder, untuk mencari faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata.

Penelitian Mustikawati, Sunarti, and Pangestuti (2017) mengenai peran Disbudparpora dalam perencanaan pengembangan ODTW, Prasarana, dan promosi wisata alam Telaga Ngebel. Penelitian Permatasari and Wahyono (2017) mengkaji daya tarik dan faktor yang mempengaruhi di Kampung wisata Sosrowijayan. Penelitian Sumartiah (2016) lebih ke mengenali potensi kampung sebagai kampung wisata. Dan penelitian Wuri, Hardanti, and Harnoto (2015) melihat dampak yang di timbulkan kampung Wisata.

Penelitian Mutiarawati (2017) melakukan penelitian Collaborative Governance dengan tujuan sebagai penyelesaian permasalahan banjir yang terjadi secara pasang surut. Penelitian Febrian (2018) dilakukan dengan meninjau konsep dan regulasi terkait UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dengan menggunakan teori Collaborative Governance sebagai acuan penelitiannya. Penelitian yang di lakukan oleh Sururi (2018), peneliti melakukan Identifikasi pada isu-isu strategis dan prioritas serta melakukan pengembangan model yang inovasi pada kebijakan terkait revitalisasi cagar budaya.

Berdasarkan 15 penelitian terdahulu adanya perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu mencoba menemukan model pengembangan CBT yang cocok untuk di terapkan pada wisata yang di teliti, mencoba menganalisis peran stakholder dalam pengembangan wisata, melihat pengaruh pengembangan wisata terhadap ekonomi masyarakat, dan Mencoba melakukan identifikasi terhadap pengembangan model dengan prespektif Collaboratif Governance untuk mengatasi permasalahan. Berbeda dengan penelitian ini dimana penelitian yang hanya memfokuskan pada Tatakelola Kolaborasi pada pengembangan wisata Kampung yang termasuk sebagai bentuk CBT dengan melihat sejauh mana peran stakeholder dalam pengembangan wisata, pola hubungan kerjasamanya, dan Tatakelola kolaborasi antara stakeholder terkait.

Penelitian ini di lakukan juga dengan melihat situasi adanya perkembangan pariwisata yang menjadikan pemukiman taman sari sebagai wisata kampung terakreditasi dengan kategori rintisan dan perlu penguatan untuk pengembangan wisata. Wisata kampung dengan potensi budaya dan heritage di tawarkan yang juga belum ada pada penelitian sebelumnya, semua itu berdasarkan “Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2016” tentang penyelenggaraan kampung wisata, dengan tujuan mendukung kegiatan kepariwisataan yang berbasis potensi wilayah baik daya tarik alam, kehidupan sosial masyarakat, seni budaya dan tradisi, kerajinan dan kuliner dan sebagai bentuk terciptanya wisata berbasis masyarakat Comunity Base Tourism (CBT). Dengan peneliti peneliti mencari tau bagaimana pengembangan kampung taman sari dari segi Tata kelola kolaborasinya dengan melihat kendala yang ada dalam

tahapan dan proses kerjasamanya agar nanti memberikan gambaran, masukan, serta rekomendasi untuk setiap stakeholder terkait.

F. Kajian Teori

Pada kajian teori peneliti memikirkan secara rasional masalah yang akan di tetapkan pada penelitian dengan teori, konsep, dan model. Semua teori, konsep, dan model di dapatkan pada literatur-literatur karya ilmiah. Beragam literatur dapat di gunakan peneliti untuk menemukan konsep, teori, dan model yang sesuai pada penelitian, tetapi dengan menyesuaikan aturan secara akademik dan dapat di pertanggung jawabkan kredibilitasnya. Berikut kajian teori mengenai Tata Kelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat:

1. Peran Stakeholder

Dalam mengidentifikasi stakeholder yang ikut terlibat di sektor pariwisata khususnya pada pengembangan, Mitchell et al (1997) dalam Zaenuri (2018) memberikan 3 unsur yang dapat di gunakan untuk syarat individu atau kelompok di anggap sebagai stakeholder, individu atau kelompok bisa di kata stakeholder apabila memiliki unsur, kekuasaan, legitimasi, dan urgensi, unsur itu juga menentukan sejauh mana individu atau kelompok itu mempunyai arti yang penting. Stakeholder mempunyai peran sangat penting dalam menjalankan program atau kebijakan khususnya dalam pengembangan bidang pariwisata, maka pemangku kepentingan yang terlibat harus memiliki kekuasaan dalam bentuk

beberapa wewenang, memiliki legitimasi untuk terlibat, dan memiliki urgensi atau pengaruh langsung.

Ketiga karakteristik pemangku kepentingan diatas bisa di gunakan untuk mendefinisikan stakholder juga bisa dipakai untuk menggambarkan intensitas diantara stakeholder terkait Clarkson (1995) dalam Zaenuri (2018) dengan adanya intensitas keterlibatan yang berbeda-beda pada pengelolaan pariwisata membagikan pemangku kepentingan menjadi stakeholder primer/utama dan stakeholder sekunder. Dimaksud pemangku kepentingan primer, individu atau kelompok yang mendukung sangat penting untuk kelangsungan hidup dan fungsi organisasi sektor pariwisata. Pemangku kepentingan sekunder sebagai individu atau kelompok yang tidak penting untuk kelangsungan hidup organisasi, tetapi yang di masa lalu, sekarang atau dimasa depan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi.

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang individu atau kelompok melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, itu mempunyai arti bahwa mereka telah menjalankan suatu peran (Soekamto, 2004) dalam (Handayani & Warsono, 2017). Menurut Handayani and Warsono (2017, p. 3) pada program pembangunan diklarifikasi bedasarkan peranannya, seperti berikut:

- a Policy creator yaitu stakeholder yang berperan mengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b Koordinator yaitu stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat.

- c Fasilitator yaitu stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- d Implementer yaitu stakeholder yang berperan sebagai pelaksana kebijakan yang didalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e Akselerator yaitu stakeholder yang berperan mempercepat dan memberi kontribusi agar suatu program berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Setelah mengidentifikasi Stakeholder yang terlibat dengan perannya masing-masing, selanjutnya mengklarifikasi pemangku kepentingan digunakan analisis berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh. Metode yang digunakan, untuk mengklasifikasikan pemangku kepentingan adalah menggunakan metode matriks kepentingan-pengaruh (Reed et al., 2009; Thompson, 2011; Gardner et al., 1986) dalam (Wakka, 2014, p. 51):

- a Stakeholder Subyek (Subjects) diklarifikasi dengan tingkat kepentingan (interest) yang tinggi tetapi memiliki pengaruh (power) yang rendah. Stakeholders ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan stakeholders lainnya. Stakeholder ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan stakeholders ini harus tetap dijaga dengan baik.
- b Stakeholders Kunci (Key Players) dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (power) yang tinggi. Stakeholders ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru.

- c Stakeholders Pengikut Lain (Crowd) dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (power) yang rendah. Diperlukan sedikit pertimbangan untuk melibatkan stakeholders ini lebih jauh karena kepentingan dan pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu. Stakeholders ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik.
- d Stakeholders Pendukung (Contest setters) dengan tingkat kepentingan (interest) yang rendah tetapi memiliki pengaruh (power) yang tinggi. Stakeholders ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Stakeholders ini dapat berubah menjadi key palyers karena suatu peristiwa. Hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina, untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan.

2. Collaborative Governance

Governance merupakan bagian dari collaberative Governance maka sebelum membahas tentang Collaborative Governance perlu menjelaskan tentang apa itu governance. Ini di gunakan agar dapat di pahami secara mudah bagi peneliti maupaun pembaca. Memulai dari sepuluh tahun yang lalu pada era sebelum reformasi di indonesia tahun 1998, publik lebih mengenal namanya government dengan artian pemerintah atau pemerintahan daripada governance yang berartikan juga pemerintah atau pemerintahan. Government di pandang memiliki arti sempit dengan ambang-ambang hanya pemerintah dapat mengatur,

dan mengasih pelayanan dengan anggapan kita masyarakat penerima tidak aktif. Pada konsep governance kita di pandang sebagai bagian dari proses.

Keberadaan sektor pariwisata di suatu kawasan atau wilayah sebenarnya memberikan dampak positif dan negatif. Namun berawal dari situ tergantung pada manajemen bisa juga tata kelola kepariwisataan yang oleh semua aktor stakeholder pada unsur pemerintahnya, industri (swasta), maupun pada unsur masyarakatnya yang berada pada sekitar kawasan wilayah tersebut. Pencapaian tujuan dan misi pembanguna pariwisata, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan hanya akan di dapat terlaksana manakala dalam proses capaiannya dapat di lalui dengan tatakelola pariwisata.

Menurut Sunaryo (2013, p. 77) mengemukakan bahwa prinsip dari penyelenggaraan tata kelola pariwisata adalah adanya koordinasi, dan sinkronisasi program dari stakholder yang ada serta di lihat juga dari partisipasi yang secara terpadu dan saling menguatkan antar aktor pemerintah, aktor swasta atau industri pariwisata, dan aktor masyarakat setempat yang terkait. Berdasarkan semua itu secara teoritis pola manajemen pada penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan yang akan menciptakan Tatakelola yang baik dapat dengan mudah di kenali dari berbagai ciri dalam penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip seperti berikut:

- 1) Partisipasi Masyarakat
- 2) Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan
- 3) Kemitraan Kepemilikan Lokal
- 4) Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

- 5) Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat
- 6) Daya Dukung Lingkungan
- 7) Monitor dan Evaluasi Program
- 8) Akuntabilitas Lingkungan
- 9) Pelatihan Pada Masyarakat Terkait
- 10) Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Dari berbagai teori yang ada dapat di simpulkan bahwa tatakelola yang baik merupakan dua kekuatan dengan mendukung satu sama lain antara masyarakat dan pemerintah, contohnya dengan: masyarakat yang membuang rasa apatisnya dan membangun rasa simpatik untuk kontribusinya, dengan bekerja sama pemerintah yang juga harus terbuka dalam mendengarkan pendapat dan sigap melakukan upaya mengatasi masalah.

Menurut Zaenuri (2018) meskipun keberadaan Governance di ambang-ambang ketidak jelasan dengan dilema yang ada, namun keberadaan teori dari Governance mampu menciptakan sebuah kelarasan yang semakin signifikan dalam mengurus urusan di public. Terlibatnya aktor lain selain negara di urusan public dengan tujuan jelas bisa menjadikan muncul persoalan tersendiri. Dengan begitu harus ada masalah model partisipasi yang cocok agar nanti kekuatan negara tidak melemah, maka di sini negara harus mampu membangun kerjasama diantara stakeholder sebagai upaya berkelanjutan. Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas mengenai tata kelola dapat di simpulkan, governance adalah bagian dari pengelolaan urusan pemerintahan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta di dalam segala bidang.

Salah satu konsep governance yang paling mengedepankan prinsip kerjasama dan untuk menjelaskan fenomena kolaborasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dikembangkan adalah konsep Collaborative Governance, dari pendapat Ansell and Gash (2008, p. 545) "*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*". Dimana collaborative governance berkaitan dengan governance atau bisa di katakan sebagai bagian dari tipenya. Konsep ini berpikir ketika dalam sesuatu kondisi penting akan ada kerjasama antara aktor public dan aktor swasta yang nantinya akan menciptakan sesuatu produk hukum, aturan, dan kebijakan untuk penyelenggaraan publik. Konsep ini melihat bahwa aktor publik (pemerintah) dan aktor privat (swasta) melakukan kerja sama dengan tujuan tidak lain untuk kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut Ansell and Gash (2008, p. 544) mendefinisikan Collaborative Governance sebagai "*A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*". Dengan begitu pendapat di atas berfikir kolaborasi merupakan sebuah upaya membuat aturan yang mengatur suatu lembaga yang mengurus urusan publik, lembaga tersebut harus mempunyai suatu kepentingan dalam mengatur urusan non-negara. Masing-masing pihak harus terikat secara formal dan mempunyai komitmen yang kuat seperti yang sudah disepakati diawal sebelum menjalankan kolaborasi,

kepercayaan terhadap tugas-tugas yang di jalankan masing-masing pihak dengan tetap melakukan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program.

Dari konsep kolaborasi memungkinkan untuk terjadinya kerjasama diantara ketiga pilar governance karena sudah diyakini adanya visi bersama maka semakin menumbuhkan partisipasi yang tinggi pada sektor non pemerintah. Masyarakat dan pihak swasta memperoleh ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam manajemen urusan-urusan publik. Partisipasi dapat menumbuhkan democratic governance yang melibatkan masyarakat luas dari segala lapisan untuk menentukan agenda-agenda publik (Newman, 2004) dalam (Zaenuri, 2018, p. 6), dalam rangka pencapaian tujuan Collaborative Governance tidak bisa di lakukan dengan independent.

Menurut Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012, p. 2) mendukung pendapat di atas dengan menyatakan *“the processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished”*. Dimana pada Collaborative Governance adanya proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan banyak bersifat umum yang tidak bisa di ciptakan jika di lakukan dengan satu pihak.

Menurut Wildavsky (1973), sebagaimana dikutip oleh Wanna and O'Flynn (2008, p. 3) bahwa kolaborasi melibatkan beberapa dimensi yang berbeda, Yaitu *“First, collaboration could involve cooperation to build commonality, improve consistency and align activities between actors. Second, collaboration can be the process of negotiation, involving a preparedness to compromise and make trade-offs. Third, collaboration can involve oversight roles, checking, pulling together and central coordination. Fourth, collaboration can involve power and coercion, the ability to force outcomes or impose one’s own preferences on another, to some extent, with their compliance or involvement. Fifth, collaboration can involve future commitments and intentions, prospective behaviour, planning or preparation to align activities. Finally, collaboration can involve engagement, the development of internal motivations and personal commitment to projects, decisions, organisational goals or strategic objectives”*. (Pertama, kolaborasi bisa melibatkan kerjasama untuk membangun kesamaan, meningkatkan konsistensi dan menyelaraskan kegiatan antara aktor-aktor. Kedua, kolaborasi dapat menjadi proses negosiasi, yang melibatkan kesiapan untuk berkompromi dan membuat trade-off. Ketiga, kolaborasi dapat melibatkan peran pengawasan, pemeriksaan, menarik bersama-sama dan koordinasi pusat. Keempat, kolaborasi dapat melibatkan kekuasaan dan pemaksaan, kemampuan untuk memaksa hasil atau memaksakan preferensi sendiri kepada yang lain, sampai batas tertentu, dengan kepatuhan atau keterlibatan mereka. Kelima, kolaborasi dapat melibatkan komitmen dan niat masa depan, kemungkinan berperilaku, perencanaan atau persiapan untuk menyelaraskan kegiatan. Keenam, kolaborasi dapat

menumbuhkan keterlibatan, pengembangan motivasi internal dan komitmen pribadi untuk kegiatan, keputusan, tujuan organisasi atau tujuan yang lebih strategis). Meskipun kenyataannya dari keenam dimensi yang ada tersebut tidak selalu berjalan konsisten atau pelengkap satu sama lain, tetapi juga bisa bersifat saling eksklusif.

Adapun menurut Ansell and Gash (2008, p. 545) Collaborative Governance mempunyai 6 kriteria “1). *The forum is initiated by public agencies or institutions*; 2). *Participants in the forum include nonstate actors*; 3). *Participants engage directly in decision making and are not merely “consulted” by public agencies*; 4) *The forum is formally organized and meets collectively*; 5). *The forum aims to make decisions by consensus (even if consensus is not achieved in practice)*; and 6). *The focus of collaboration is on public policy or public management*. Demikian penekanan kriteria Collaborative Governance di kemukakan, adanya forum yang melibatkan lembaga publik maupun aktor-aktor yang menjadi lembaga publik formal, aktor non publik atau pemerintah juga termasuk di dalam forum tersebut, semua yang terlibat mempunyai andil dalam mengambil keputusan, forum bersifat formal yang merupakan rapat bersama, forum sebagai tempat musyawarah dan mufakat, fokus kolaborasi pada kebijakan dan pengelolaan public.

Menurut Shergold (2008, p. 20) pada konsep Collaborative Governance adalah suatu proses yang mempunyai sifat bertransformatif, di mulai dari hubungan komando hingga sampai interaksi yang bercirikan hubungan kolaborasi. Berikut ini tabel yang dapat dilihat untuk menjelaskan proses Kolaborasi:

Tabel 4. Proses Transpormasi Kolaborasi

Command	The process of centralized control – with clear lines of hierarchical authority,
Coordination	The process of collective decision making - imposed on participating institutions.
Cooperation	The process of sharing ideas and - resources for mutual benefit.
Collaboration	The process of shared creation – brokered between autonomous institutions.

Sumber: Shergold (2008, p. 20)

Proses transpormasi kolaboratif diatas bermula dari kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lain dengan sifat komando, pada tahap ini pemerintah mempunyai kontrol yang kuat, pemangku kepentingan lain tidak terlibat dalam-21 pengambilan keputusan (hirarki). Berikutnya Coordination pemerintah dan pemangku lain sudah terjadi proses pengambilan keputusan dengan sifat Kolektif, kemudian hubungan bersifat kolektif tersebut meningkat menjadi hubungan bersifat kooperatif. Dimana hubungan koperatif ini sudah adanya berbagi ide dan sumberdaya dengan tujuan untuk mendapatkan maanfaat bersama. Pada tahap akhir adalah hubungan yang bersifat kolaboratif, sifat kolaboratif ini sudah terjadinya hubungan sampai tahap berbagi kreasi yang berwujud bentuk lembaga dengan sifat permanen dan otonom.

Sebagaimana yang di kemukakan peneliti sebelumnya Zaenuri (2016, p. 22) menyatakan, proses kolaborasi bisa di mulai dari membuat ide bersama atau harapan hingga kedepannya terjadi aktifitas kemitraan, lebih lanjut tahapan pada Collaborative Governance di mulai dengan membangun “visi bersama”, kemudian mendorong terjadinya “partisipasi” dari seluruh stakholder, pada seluruh stakeholder terbentuklah “jaringan” yang luas, kemudian menghasilkan sebuah

kemitraan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berikut penjelasan singkat tentang tahapan-tahapannya:

1) Visi Bersama

Menurut Susanto (2010, p. 27) dalam Zaenuri (2016, p. 22) visi bersama merupakan suatu kepentingan yang sama untuk di capai dengan tujuan tertentu di masa depan. Lebih lanjut dalam pengelolaan suatu urusan melibatkan suatu individu atau kelompok stakholder dengan adanya landasan visi maka terjali dengan erat. Visi bersama juga bisa menggerakkan orang agar lebih aktif sebagai pribadi atau bagian dari massa untuk mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok.

2) Partisipasi

Menurut Zaenuri (2016, p. 24) dalam kerangka teori Dmocratic citizenship, partisipasi adalah bagian dari memperlibatkan individu dalam mengambil keputusan atau pun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut Partisipasi adalah bagian dari penyelenggaraan Kolaborasi, di dalam pengembangan pariwisata pada penyelenggaraannya sebagai pemikat hubungan, ataupun sebagai senjata untuk menjaga hubungan di antara stakeholder dengan melihat peran keterlibatan msing-masing akan mampu tercapainya konsep pada Governance. Pada proses konsep kolaborasi, partisipasi merupakan bagian dari terbentuknya mitra atau kemitraan dari berbagai pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta, yang memiliki kewajiban ikut dalam mengambil keputusan dan implementasi program, serat kebijakan.

3) Jejaring

Menurut Provan and Kenis (2008, p. 231) dalam konsep Governance istilah pada jaringan dalam arti sempit di anggap sebagai tiga kelompok atau bisa lebih individu atau organisasi otonom yang bekerja sama dengan tujuan untuk mereka sendiri tapi juga tujuan bersifat kolektif. Jaringan itu di mulai sendiri, oleh anggota jaringan diri sendiri, ataupun bersifat mandat atau kontrak, seperti yang biasa terjadi pada sektor publik. Pada konteks manajemen publik jaringan koordinasi di anggap relevan, tidak seperti jaringan yang biasa hanya untuk sekedar tujuan profit ataupun organisasi nirlaba, jaringan koordinasi sering di gunakan pada hubungan jaringan sektor dan multisektoral.

4) Kemitraan

Menurut Dwiyanto (2015, p. 256) dasarnya kemitraan dalam bentuk kerjasama yang memiliki tujuan ataupun kepedulian terhadap masalah isu yang ada, dengan saling berbagi sumberdaya, resiko, tanggungjawab, dan manfaat. Dari kerjasama itulah kemitraan mengarah ke kepentingan jangka panjang dari pemangku kepentingan karena itu sangat di perlukan daya tahan dan interaksi secara tinggi dari stakeholder. Setidaknya untuk mewujudkan prinsip kemitraan harus berisi hal yang berkaitan dengan etika dasar seperti karakter, integritas, dan kejujuran.

Adapun model tahapan dan proses juga di nyatakan oleh Ansell and Gash (2008, pp. 550-561), mulai dari kondisi awal (Starting Conditions) mengatur dasar tingkat kepercayaan, konflik, dan model sosial yang menjadi sumber daya atau kewajiban selama kolaborasi. Kedua, Kepemimpinan fasilitatif (Facilitative

leadership) menyediakan mediasi penting dan fasilitas untuk proses kolaborasi. Desain kelembagaan (Institusional design) menetapkan aturan dasar dimana kolaborasi berlangsung. Terakhir terjadinya proses kolaborasi yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut; 1). Dialog tatap muka (face to face dialog); 2). Membangun kepercayaan (trust building); 3). Komitmen terhadap proses (commitment to the proses); 4). Berbagi pemahaman (shared understanding); dan 5). Hasil sementara (Intermediate outcomes). Berikut uraian singkat yang ada menjelaskan setiap tahapan di atas:

1. Kondisi awal (Starting Conditions)

Bahwa kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat memfasilitasi atau menghambat kerja sama antara pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan. Kondisi awal di persempit menjadi tiga variabel besar: ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuatan pemangku kepentingan yang berbeda, insentif yang harus dikolaborasikan oleh pemangku kepentingan, dan sejarah konflik atau kerja sama sebelumnya di antara para pemangku kepentingan, berikut penjelasannya:

a Ketidak Seimbangan Sumber Daya

Jika ada ketidakseimbangan kekuatan / sumber daya yang signifikan antara pemangku kepentingan, sedemikian sehingga pemangku kepentingan penting tidak dapat berpartisipasi dengan cara yang bermakna, maka tata kelola kolaboratif yang efektif membutuhkan komitmen terhadap strategi pemberdayaan yang positif dan perwakilan pemangku kepentingan yang lebih lemah atau kurang beruntung.

b Insentif Untuk Berpartisipasi

Meskipun pendekatan kolaboratif dapat dimandatkan, partisipasi pemangku kepentingan biasanya bersifat sukarela. Akibatnya, insentif yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi akan menjadi faktor besar dalam menjelaskan apakah tata kelola kolaborasi dapat berhasil. Insentif untuk berpartisipasi rendah ketika pemangku kepentingan dapat mencapai tujuan mereka secara sepihak atau melalui cara alternatif. Jika ada alternatif di mana pemangku kepentingan dapat mengejar tujuan mereka secara sepihak, maka tata kelola kolaborasi hanya akan berfungsi jika pemangku kepentingan menganggap diri mereka sangat saling bergantung.

c Prasejarah Antagonisme dan Kerjasama

ketika para pemangku kepentingan sangat saling bergantung, konflik tingkat tinggi sebenarnya dapat menciptakan insentif yang kuat untuk tata kelola kolaboratif. Tapi Prasejarah konflik kemungkinan akan mengekspresikan dirinya dalam tingkat kepercayaan yang rendah, yang pada gilirannya akan menghasilkan tingkat komitmen yang rendah, strategi manipulasi, dan komunikasi yang tidak jujur. Di sisi lain, sejarah kerja sama masa lalu yang sukses dapat menciptakan modal sosial dan tingkat kepercayaan tinggi yang menghasilkan siklus kolaborasi secara baik.

2. Kepemimpinan Fasilitasi (Facilitative Leadership)

Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan,

memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Kepemimpinan juga penting untuk memberdayakan dan mewakili pemangku kepentingan yang lebih lemah. Ryan (2001, p. 241) dalam Ansell and Gash (2008, p. 554), mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif : manajemen yang memadai dari proses kolaboratif, menjaga kredibilitas teknis, dan memastikan bahwa kolaboratif diberdayakan untuk membuat kredibilitas dan keputusan meyakinkan yang dapat diterima oleh semua orang.

3. Desain Kelembagaan (Intitutional Design)

Desain kelembagaan merujuk pada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi, yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Akses ke proses kolaboratif itu sendiri mungkin merupakan masalah desain yang paling mendasar. Pada prosesnya kolaboratif menekankan bahwa pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif. Transparansi proses berarti bahwa para pemangku kepentingan dapat merasa yakin bahwa negosiasi publik adalah nyata dan bahwa proses kolaboratif bukanlah kedok untuk kesepakatan pribadi ruang belakang.

4. Proses Kolaborasi (The Collaborative Proses)

Model tahap kolaborasi adalah penting untuk menarik perhatian pada strategi kolaborasi yang berubah saat konteks berubah. Lebih lanjut model proses tata kelola kolaboratif kadang-kadang menggambarkan kolaborasi sebagai berkembang secara bertahap. Bahkan sulit untuk mengetahui di mana harus memulai deskripsi proses kolaboratif. Namun,

karena komunikasi adalah jantung dari kolaborasi, maka di mulai dengan dialog tatap muka.

a Dialog Tatap Muka (Face To Face Dialog)

Semua tata kelola kolaboratif dibangun berdasarkan dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan. Sebagaimana yang berorientasi pada proses, melalui dialog langsung diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk saling menguntungkan. Namun, dialog tatap muka lebih dari sekadar media negosiasi, Ini adalah jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, berbagi pemahaman, dan komitmen sehingga stakholder dapat bekerjasama. Lebih lanjut dialog tatap muka secara langsung dapat meminimalisir stereotip atau perbedaan status atau untuk antagonisme dan saling tidak hormat.

b Membangun Kepercayaan (Trust Building)

Kurangnya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan adalah titik awal yang umum untuk tata kelola kolaboratif. Proses kolaboratif tidak hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Membangun kepercayaan sangat di perlukan untuk memulai kolaborasi agar nanti para stakholder tidak mengalami egosentrisme dalam proses kolaborasi. Membangun kepercayaan memerlukan proses yang memakan waktu yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaboratif

maka dari itu di butuhkan sosok pemimpin yang dapat menyadari pentingnya sebuah kolaborasi.

c Komitmen Terhadap Proses (Comitment To The Proses)

Banyak penelitian yang menemukan bahwa komitmen sebagai variabel penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan serta komitmen anggota di katakan faktor penting yang memfasilitasi kolaborasi. Maka dapat di katakan bahwa komitmen memiliki hubungan atau kaitan yang sangat erat dalam proses kolaborasi. Lebih lanjut komitmen mampu menciptakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam kerjasama, komitmen yang kuat dari setiap stakholder di perlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen bukan hal yang rumit pada kolaborasi, tetapi komitmen merupakan sebuah tanggung jawab dari stakholder supaya melihat relasi yang di lakukan sebagai hal baru dan tanggung jawab tersebut perlu di kembangkan.

d Pemahaman Bersama (Shared Understanding)

Pada titik tertentu dalam proses kolaboratif, para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang secara kolektif dapat mereka capai bersama. Berbagai penelitian menjelaskan pemahaman bersama sebagai misi bersama, kesamaan, tujuan bersama, visi bersama, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategis atau penyalarsan nilai-nilai inti. Pemahaman bersama juga bisa menyiratkan kesepakatan tentang definisi masalah Atau, itu bisa berarti kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang

diperlukan untuk mengatasi masalah. Pengembangan pemahaman bersama dapat dilihat sebagai bagian dari “proses pembelajaran kolaboratif yang lebih besar”.

e Hasil Sementara (Intermediate Outcomes)

Hasil sementara merupakan hasil atas proses yang sedang berlangsung dan memberi manfaat serta bernilai strategis. Lanjutan dalam proses tersebut terwujud sebagai bentuk output atau keluaran yang nyata, hal ini sebagai hasil dari proses kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberasilah kolaborasi.

Dalam konteks untuk pengembangan wisata seperti destinasi terkait ODTW, Pemasaran, Kelembagaan dan SDM, dari berbagai teori yang telah di kemukakan bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan kolaborasi yang mengarah pada pengembangan. Dalam pelaksanaan pengembangan wisata bersifat kompleks maka pada kolaborasinya membutuhkan acuan variabel yang luas, seperti terciptanya pelayanan berkualitas dari produk wisatawan yang di tawarkan, dengan demikian adanya pengembangan ODTW dan Prasarana termasuk fasilitas memang di tujukan untuk membuat kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata akan lebih mudah tercapai. Pada pelaksanaan kolaborasi pun akan saling menguntungkan tiap stakeholder yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Hal ini lantaran tiap aktor saling berperan dan juga dapat mengembangkan kapasitasnya di mulai dari awal hingga proses kolaborasinya mampu mencapai tujuannya dalam pengembangan pariwisata. Dengan begitu

dapat mengetahui dan memahami bagaimana kolaborasi yang terjadi serta nantinya dapat memberi masukan kepada setiap stakeholder.

3. Kampung Wisata

Saat ini objek wisata yang sedang di gencarkan pemerintah khususnya pemerintah DIY salah satunya adalah objek Kampung wisata atau Desa wisata yang merupakan wilayah dimana penduduknya mempunyai aktivitas di berbagai bidang seperti bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk di dalamnya bangunan cagar budaya maupun dari tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya masyarakat, dan seni tradisi masyarakat, serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi wisata (Perwal Yogyakarta No. 115 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata).

Dalam penyelenggaraan kampung wisata pada perinsipnya kampung wisata ini harus memberikan pengaruh dalam pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya di kawasan atau daerah tersebut, dengan menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menjaga kebersihan di lingkungan kampung wisata, menjaga keunikan kampung wisata, keaslian kampung, kearifan lokal, dan hal yang terdapat pada kampung wisata agar mampu menjadi daya tarik wisatawan.

Masyarakat di kampung wisata mempunyai peran yang sangat penting sebagai tuan rumah dalam pembentukan kampung wisata. Dikarenakan kampung bisa di katakan kampung wisata, jika kampung tersebut mempunyai aktifitas masyarakat yang dapat di tonjolkan nantinya akan memberi pengaruh untuk

pariwisata pada kampung wisata tersebut. Masyarakatlah yang mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan wisata yang ada pada kampung tersebut. Daya tarik objek wisata harus di miliki masing-masing kampung wisata karena sebagai potensi unggulan yang mampu menarik wisatawan dalam berkunjung. Kemudian kampung wisata juga di haruskan untuk memiliki tempat untuk di jadikan pusat dari kegiatan masyarakat di kampung wisata tersebut.

Di ketahui kampung wisata tercipta dari sesuatu wilayah perkampungan yang di dalamnya memiliki berbagai potensi wisata dengan berbungkus kegiatan-kegiatan masyarakat, maupun dengan potensi alam. Pada dasarnya penerapan kampung wisata juga harus memenuhi beberapa tuntutan seperti fasilitas yang memadai, dan aktraksi yang di tawarkan. Dimana di jelaskan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 pada pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam , sereta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan itu meliputi: “ 1). Industri Pariwisata, 2). Destinasi Pariwisata, 3). Pemasaran 4).Kelembagaan dan SDM Pariwisata “.

Potensi kawasan budaya yang merupakan tempat akifitas kehidupan berbudaya menjadi tumbuhnya wisata Kampung sebagai pariwisata dapat mencangkup dua hal, yaitu ekonomi dan sosial budaya. Jika di lihat dari sisi ekonomi, pengembangan pariwisata menjadi bagian dari upaya peningkatan daya saing produk wisata dan sekaligus sebagai meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga devisa negara.

Di lihat dari sisi sosial budaya, pengembangan wisata merupakan pengaruh dari peningkatan peran serta pemerintah, dunia usaha atau swasta, dan masyarakat serta organisasi-organisasi dalam koordinasi antara sektor dan lembaga yang ada. Sehingga dalam sektor pariwisata Kampung dapat memberikan peran melibatkan Stakholder masing-masing dalam upaya pengembangan ODTW dan prasarana berdasarkan inilah kemudian yang di kenal sebagai konsep dari pariwisata berkelanjutan.

4. Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pengertian dari partisipasi sangatlah penting untuk di ketahui oleh siapapun khususnya stakholder yang berkaitan pada pariwisata karena pariwisata berbasis masyarakat sangat memerlukan masyarakat dalam keterlibatannya pada tatakelola pariwisata. Jika tanpa adanya keterlibatan masyarakat, proses dari pariwisata tidak akan mencapai tujuan ataupun sasaran yang tepat. Menurut Muallidin (2007, p. 7) pariwisata berbasis masyarakat merupakan bentuk pariwisata yang menyadari adanya kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan dengan bentuk pariwisata yang di kelola di miliki oleh masyarakat untuk masyarakat kembali, dengan tujuan membantu para wisatawan untuk meningkaan kesadaran serat belajar tentang masyarakat dan tatanan kehidupan masyarakat lokal. Pariwisata berbasis masyarakat adalah model pengembangan pariwisata sengan memiliki asumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai masyarakat sebagai kebutuhannya dengan berupaya menciptakan wisata

yang bermanfaat bagi kebutuhan, berlandaskan inisiatif dan peluang masyarakat setempat.

Lebih lanjut Muallidin (2007, p. 7) menambahkan konsep pariwisata berbasis masyarakat berdasarkan kepunyaan prinsi-prinsip yang bisa di gunakan sebagai dari tool of community development bagi masyarakat lokal, yaitu: *“Pertama, Mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat. Kedua, Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek. Ketiga, Mempromosikan kebanggaan masyarakat. Keempat, Meningkatkan kualitas hidup. Kelima, Menjamin sustanbilitas lingkungan. Keenam, Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik. Ketujuh, Membantu mengembangkan cross-cultural learning. Kedelapan, Menghormati perbedaan-perbedaan kultural dan kehormatan manusia. Kesembilan, Mendistribusikan keuntungan secara adil di antara anggota masyarakat. Kesepuluh, Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat”*

Community Based Tourim menurut Nugroho (2017, p. 2) di Tujuan sebagai alat pengembangan komunitas dan konsevasi lingkungan. Untuk tujuan ini, harus di lihat secara menyeluruh mengenai aspek yang dapat memberikan dampak pada komunitas seperti pada aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan juga politik. Semua itu di kelola dan di miliki oleh masyarakat dan untuk masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran pengunjung dan belajar mengenai bagaimana cara hidup komunitas. Sehingga dalam konsep pariwisata berbasis pada masyarakat, masyarakatlah yang di ajari mengelola destinasi pariwisata yang meliputi keseluruhan di lokasi pariwisata tersebut, termasuk

dalam penyediaan produk ataupun pelayanan yang di butuhkan oleh wisatawan. Dengan demikian memungkinkan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat di sekitar objek wisata.

Pembangunan berbasis masyarakat model pembangunan yang menciptakan peluang sebesar-besarnya kepada rakyat di pedesaan untuk ikut terlibat di dalam pembangunan pariwisata. Pariwisata berbasis masyarakat adalah kegiatan yang di lakukan sepenuhnya dari masyarakat, dengan ide dan pengelolaan secara terlibat dan pemanfaatan dapat langsung di rasakan oleh masyarakat setempat (Sidiq & Resnawaty, 2017, p. 39). Dengan demikian pada kampung wisata atau desa wisata masyarakat di anggap sebagai stakholder yang mempunyai peran penting dalam bagian pengembangan destinasi wisata. Kampung wisata di harapkan bisa menjadi bentuk penerapan pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Di sisi lain keberadaan kampung wisata yang bernilai pada kebudayaan dapat di kembangkan sebagai upaya pelestarian tanpa harus merusaknya.

Peace (1995) dalam (Sidiq & Resnawaty, 2017, p. 40), mengartikan perkembangan kampung wisata sebagai bagian dari suatu proses dengan menekankan cara mengembangkan atau memanjukkan desa wisata. Secara spesifik, pengembangan kampung di artikan sebagai upaya usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas dalam objek wisata sebagai tujuan memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung. Masyarakat setempatlah yang mempunyai peran penting dalam usaha perkembangan yang juga sebagai tuan rumah karena sudah pasti sumber daya dan keunikan tradisi maupun budaya sudah melekat pada

komunitas yang sebagai unsur utama pada kegiatan wisata. Keberhasilan pengembangan kampung wisata tergantung pada tingkat penerimaan yang dilakukan masyarakat dan tingkat dukungan dari masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu aktor stakeholder dan juga sebagai tuan rumah di kampung wisata, Menjadikan pelaku penting yang mempunyai peran dalam proses pengembangan kampung wisata, di mulai dari tahap perencanaan, tahap pengawasan, dan tahap implementasi pengembangan.

G. Definisi Konsepsional

1. Peran Stakeholder

Peran stakeholder adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan individu atau kelompok yang mempunyai unsur kekuasaan, legitimasi, dan urgensi dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

2. Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan Penyelenggaraan pariwisata dengan adanya kontribusi dan kolaborasi dari masing-masing stakeholder yang dapat diukur dengan tahap awal kolaborasi di mulai sampai dengan proses dari kolaborasi itu sendiri secara terpadu juga saling menguatkan antar aktor pemerintah, dan Non pemerintah atau aktor masyarakat setempat yang terkait.

3. Wisata Kampung

Objek wisata Kampung merupakan wilayah yang penduduknya mempunyai aktivitas di berbagai bidang seperti bidang budaya dalam bentuk

pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan maupun dari tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat.

4. Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata berbasis masyarakat adalah manajemen dalam penyelenggaraan pariwisata di suatu tempat yang melibatkan masyarakat tempat itu dalam pengelolaan, meliputi keseluruhan di lokasi, termasuk penyediaan produk ataupun pelayanan yang di butuhkan oleh wisatawan. Keuntungan yang di dapat dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat di sekitar objek wisata.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur variabel atau sebagai petunjuk bagi penelitian untuk mengukur suatu variabel. Untuk mengetahui "*Tata Kelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Taman Sari Berbasis Masyarakat Tahun 2019*" peneliti menggunakan sebagian variabel yang berkaitan, maka definisi operasional yang di gunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan wisata.
2. Pola Hubungan Kerjasama Stakeholder.
3. Tatakelola Kolaborasi Dalam Pengembangan Kampung Wisata Tamansari Yogyakarta.

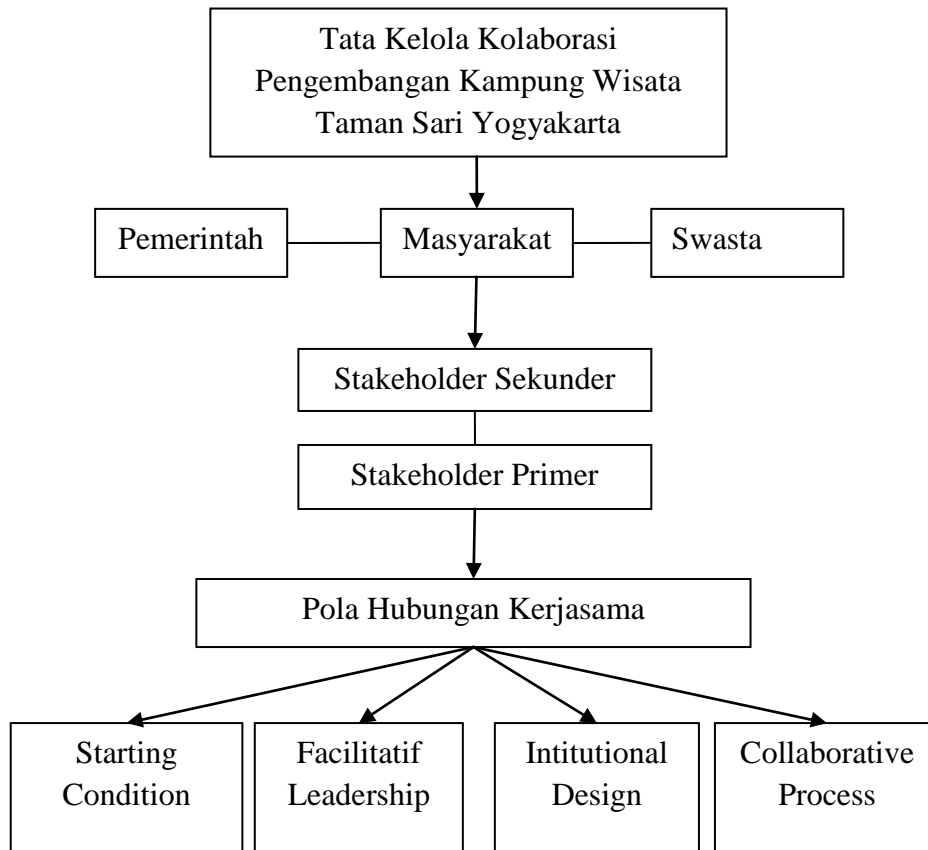
Tabel 5. Variabel dan Indikator Operasional

Variabel	Indikator
Peran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. 2. Adanya koordinasi pada setiap stakholder. 3. Adanya fasilitas dan kebutuhan yang cukup. 4. Adanya pelaksana. 5. Adanya perhitungan dan kontribusi.
Pola Hubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kontrol yang kuat dan pengambilan keputusan sepihak. 2. Adanya proses bersama dalam pengambilan keputusan. 5. Adanya proses berbagi ide/pengetahuan, dan sumberdaya. 7. Adanya hubungan berbagi kreasi yang berwujud lembaga.
Colaborative Governance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya saling berbagi sumber daya. 2. Adanya sifat sukarela. 3. Adanya sejarah kerjasama. 4. Adanya aturan yang jelas. 5. Adanya sosok pemimpin.
Proses Collaborative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pertemuan dalam pemecahan masalah. 2. Adanya rasa saling mempercayai. 3. Adanya pelaksanaan tugas dan kewajiban secara konsisten. 4. Adanya proses berbagi pemahaman dan pengertian secara kolektif. 5. Adanya capaian dari kerjasama sebelumnya.

Sumber: Diolah Peneliti (2019)

I. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. Kerangka Pikir



Sumber: Diolah Peneliti (2019)

J. Metode Penelitian

Pada sub bagian akan ini akan menjelaskan dengan lebih spesifik mengenai hal tentang metode penelitian, metode penelitian ini harus mampu menjelaskan perihal cara yang ditempuh. peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Menurut (Nazir, 2011, p. 54) deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pariwisata pada masa sekarang. Menurut Salim (2006, p. 4), penelitian kualitatif berkarakteristik seperti berikut ini:

“ 1). Data di peroleh secara langsung dari lapangan, bukan dari penelitian terkontrol, 2). Penggalan data secara ilmiah dengan kunjungan, 3). Dalam memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, prist diwajibkan mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah. ”

Sebagaimana yang di jelaskan soal studi deskriptif kualitatif maka dalam mengetahui tatakelola kolaborasi wisata di gunakan analisa data secara kualitatif. Peneliti juga dapat memaparkan secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun penelitian ini sebagai penelitian yang di lakukan untuk mendeskripsikan tentang Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Tamansari Berbasis Masyarakat.

2. Unit Analisis Data

Untuk menentukan subjek pada penelitian ini di gunakan dengan teknik purposive sampling, pengambilan sample secara purposive di dasari pada pertimbangan tertentu yang di buat oleh peneliti sendiri, penelitian ini menekankan pada kualitas informan dan bukan kuantitas atau jumlah informan. adapun informan yang di ambil pada penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Seksi Pengembangan ODTW Pariwisata Kota Yogyakarta
- 2) Ketua Kampung Wisata Tamansari Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data untuk penelitian ini menggunakan beberapa teknik antara lain yaitu, menggunakan teknik interview atau wawancara, observasi, dan juga teknik dokumentasi. Semua teknik itu saling melengkapi data yang di dapat, Berikut penjelasan masing-masing teknik yang di gunakan:

a Observasi (pengamatan)

Menurut Salim (2006, p. 14) teknik observasi di lakukan dengan metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian dengan tujuan memperoleh data.

b Interview (wawancara)

Menurut (Salim, 2006, p. 16) Teknik wawancara banyak di lakukan pada penelitian kualitatif di karenakan data-data yang terdapat pada teknik kualitatif lebih berupa kata. Teknik wawancara penelitian ini menggunakan instrumen terstruktur dan tidak terstruktur untuk mempermudah perolehan data.

c Dokumentasi

Salah satu cara yang di gunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi adalah dengan teknik dokumentasi, teknik ini mengumpulkan data bersifat tertulis misalnya dari undang-undang, buku, jurnal, artikel, data, dan dokumen-dokumen atau arsip yang ada pada instansi atau pihak-pihak yang di teliti, sehingga mendapatkan masukan informasi lebih untuk peneliti telaah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini di sesuaikan dengan metode penelitian yang di gunakan pada penelitian. Berikut uraian cara teknik analisis data Matthew B. Miles (1992) dalam Salim (2006) yang di jalankan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a Pengumpulan data

Peneliti melakukan pengumpulan data yang di dapat pada saat penelitian secara langsung di lakukan dan juga melalui data sekunder berwujud data tidak langsung.

b Pemilihan data (reduksi data)

Menurut Salim (2006, p. 22) reduksi data sesuatu yang berkaitan dengan analisis dan merupakan bagian dari proses pemusatan, pemilihan, dan penyederhanaan data yang di dapat pada saat penelitian ini dilakukan.

c Penyajian data

Langkah selanjutnya adalah proses penyajian data, pada tahap penyajian data peneliti melakukan analisis data dengan menjabarkan fakta-fakta yang di dapat pada saat penelitian.

d Menarik kesimpulan dan saran

Menarik kesimpulan dan saran ini kegiatan terakhir dalam menjalankan analisis data yang di lakukan peneliti pada saat pengumpulan data sudah dilakukan dengan mencari penjelasan yang merujuk pada rumusan masalah yang di ajukan penelitian ini. pada tahap terakhir peneliti memberikan saran atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan penelitian.